

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kajian dan pembahasan terhadap permasalahan pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab lembaga yudikatif dalam hubungan dengan putusan bebas murni atas kasus Dahlan Ibrahim, dapat berbentuk antara lain :
 - a. Lembaga yudikatif dapat mengumumkan melalui media cetak atau elektronik setiap putusan yang dinyatakan bebas murni kepada masyarakat, tidak terbatas pada pernyataan di sidang pengadilan atau lembar putusan. Hal ini sebagai tindakan pemulihan nama baik atau harta serta martabat terdakwa.
 - b. Lembaga yudikatif wajib memberikan ganti kerugian yang diderita terdakwa dan keluarganya. Kerugian disini dimaksudkan adalah kerugian materiil serta spiritual. Terkait dengan kerugian materiil, Negara dapat memberikan penggantian biaya hidup selama terdakwa tidak bekerja atau menjalan masa tahanan. Sedangkan kerugian spiritual dapat diberikan dalam bentuk pengumuman pemulihan nama baik.
 - c. Lembaga yudikatif dapat meminta pemerintah dalam menentukan besarnya nilai ganti kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa kehilangan pekerjaan.
 - d. Lembaga yudikatif dapat memberhentikan anggotanya yang secara nyata telah melakukan kesalahan dalam proses peradilan sehingga telah menyebabkan kerugian bagi terdakwa dan tidak menjunjung harkat serta martabat atau melanggar hak asasi manusia. Anggota lembaga yudikatif tersebut tidak mampu sebagai penegak hukum.
2. Kelemahan dalam komponen sistem peradilan pidana yang menyebabkan kekeliruan atas penegakan hukum, mencakupi sistem rekrutmen yang lemah, keterbatasan pengetahuan yang meliputi ilmu sosial dan eksakta dari aparat penegak hukum dan adanya pemikiran yang salah terhadap dirinya sendiri

sebagai alat Negara bukannya pengayom masyarakat sehingga dalam menerapkan hukum selalu bertindak semena-mena.

V.2 Saran

- a. Pemerintah sebagai penanggungjawab atas penerapan undang-undang perlu memberikan perlindungan terhadap terdakwa yang secara hukum terbukti tidak bersalah namun telah mengalami kerugian materiil dan spiritual. Tanggungjawab yang diberikan wajib berbentuk konkret mengingat kekeliruan dalam sistem peradilan adalah pelanggaran hak asasi terdakwa.
- b. Bentuk tanggungjawab pemerintah pun patut dituangkan dalam putusan pengadilan yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, khususnya terkait dengan ganti rugi yang diderita terdakwa bebas murni.
- c. Pemerintah harus memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan kekeliruan dalam hal penangkapan, bila diperlukan dibebaskan dari statusnya.

